



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA Milono Nomor 9, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp. (0536) 3221853 - 3221854 Fax 3221854, pt-palangkaraya.go.id, ptpalangka@gmail.com

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI**  
**Periode Januari - Desember 2022**

**A. RINGKASAN LAPORAN**

Keterbukaan informasi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 28F dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu transparansi, efektif dan efisien serta kemudahan dalam mendapatkan informasi, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, bahkan Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Pengadilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan seluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaruan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak biru pembaharuan Peradilan 2010 – 2035". Dirumuskannya cetak biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 -2035, telah dirumuskan visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang

Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung visi tersebut adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi, serta dukungan organisasi yang modern yang berbasis Informasi Teknologi.

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung Telah mengeluarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksana pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat Pengadilan pada keempat tingkat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi:

- Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengadakan seperangkat peralatan elektronik yang berbasis Teknologi Informasi sebagai sarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik;
- Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memiliki website resmi dengan domain <https://pt-palangkaraya.go.id/> sehingga diharapkan kondisi jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat;
- Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menyediakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Youtube, untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi publik;
- Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga telah menyediakan layanan informasi secara langsung melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi secara langsung;

Selama tahun 2022, nihil permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk permohonan putusan.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam rangka pelayanan informasi publik kepada masyarakat telah menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain sebagai berikut:

#### ❖ Website Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mempunyai laman website resmi yaitu <https://pt-palangkaraya.go.id/> sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik kepada pencari informasi tanpa harus mendatangi secara langsung kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan mengakses menu-menu yang tersedia pada laman website yang telah disediakan;

- a. SIPP Versi 4.1.1 lokal dan online (<https://sipp-banding.mahkamahagung.go.id/dashboard> )
- b. Website Pengadilan Tinggi Palangkaraya, alamat/url : <https://pt-palangkaraya.go.id/> yang sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Standarisasi Website di Lingkungan Peradilan Umum.
- c. Aplikasi Jadwal Sidang yang terkoneksi dengan SIPP local
- d. Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Tinggi Palangkaraya
- e. Aplikasi E-Court
- f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi, dan Survei Harian secara online yang termuat dalam Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER)
- g. Email resmi Pengadilan Tinggi Palangkaraya [ptpalangka@gmail.com](mailto:ptpalangka@gmail.com)
- h. Pada sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (TURT) dan sub bagian Keuangan dan Pelaporan menggunakan aplikasi yang terhubung dengan instansi lain yaitu Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi SIMAN, Aplikasi SAKTI, Aplikasi KOMDANAS, Aplikasi SIMARI, Aplikasi Monev Bappenas, Aplikasi SIRUP, e-Sadewa, Aplikasi E-BIMA.
- i. Pada sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan sub bagian Rencana Program dan Anggaran menggunakan aplikasi seperti Aplikasi SIKEP, Aplikasi SAPK, Aplikasi KOMDANAS, Aplikasi SIMARI dan aplikasi E-Kinerja.
- j. Aplikasi Sistem Informasi Data Advokat (SIDAT), Aplikasi Sistem Informasi Penelitian Riset dan Study (SIPRES), dan Sistem Akselerasi Penetapan Perbaikan Akta Kependudukan (SIAPPADUKA) dapat diakses melalui HUMA BETANG yang tersedia di website Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Jumat, 24 November 2023 Bahasa Inggris



Mahkamah Agung Republik Indonesia

# Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Jalan H.A. Husein Saad, Tepi Arah, (0536) 322.254 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Email: ptpalangka@gmail.com, Instagram: pengadilan\_tingg\_palangkaraya, Facebook: pengadilantinggipalangkaraya

W3C | 2.0

**BerAKHLAK** #bangga  
melayani bangsa

---

[Beranda](#)
[Tentang Pengadilan](#)
[Layanan Publik](#)
[Layanan Hakim](#)
[Sanksi](#)
[Pelayanan Publik](#)
[Perencanaan](#)

## BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

ANDA YANG KURANG MAMPU MERIKAI MENYERVI LAYANAN HUKUM PERKARA DENGAN BIAYA-CUMA-CUMA, GUNAKAN HAK ANDA!



Dapatkan Bantuan Hukum Bebas Biaya!

---

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
MEMPERKARAKAN WILAYAH BANGSA MELALUI WILAYAH BUDHAWAN, BUDIBETAWA DAN MELAYANI



KUPSI

---

SELAMAT HARI PARIWISATA 10 NOVEMBER 2023

SEMANGAT PARIWISATA UNTUK MASA DEKAD BANGSA, TAJARAN NEGARA, KEKEMISKINAN DAN KE BUDHAWAN

SURVEI KEPuasan MASYARAKAT TRIWULAN III 2022

NILAI INDEKS

3,799/94,98%

---

BERSAMA MAJUKAN INDONESIA

HARI SUMPAN PEMUDA KE-95 TAHUN

SURVEI PRESEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN III 2022

NILAI INDEKS

3,88/96,88%

---



3,88/96,88%



3,88/96,88%

---

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA MENGADAKAN AUDIENSI AKIP DENGAN AUDITOR DARI BADAN PENGAWASAN MA RI

Diuar: Kamis, 23 November 2023 17:31



Palangka Raya, 23 November 2023 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengadakan kegiatan audiensi dengan Auditor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Bazali Nery, Nauli Ferdiansyah, S.E., Ak., M.H.A., D.K., C.H.K.

Selengkapnya

RAPAT PENYUSUNAN ANGGARAN BASELINE TAHUN ANGGARAN 2025

Diuar: Kamis, 23 November 2023 06:48



Palangka Raya - 23 November 2023 | Berindaklanjuti surat dan Dit. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3413/ST/Dir.T/2023, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyelenggarakan rapat Basal Penyusunan Anggaran Baseline Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Pertemuan Aula 1st Lt. Hulang.

Selengkapnya



LAYANAN SURVEI KEPuasan MASYARAKAT & PERILAKU ANTI KORUPSI

SURVEI



---

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA MENGIKUTI TATA CARA PENYUSUNAN BASELINE T.A. 2025

Diuar: Selasa, 21 November 2023 16:25



Palangka Raya, 20 November 2023 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengikuti secara daring Tata Cara Penyusunan Baseline DPA, BUKU, MAJU 2023 yang diselenggarakan BPD, Perencanaan dan Organisasi BUK Mahkamah Agung RI.

Selengkapnya

RAPAT TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Diuar: Senin, 20 November 2023 09:09



Palangka Raya, 20 November 2023 | Dalam rangka melanjutkan surat dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1442/BP/Dir.1.1/2023, Tentang Laporan Hasil Basal, Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Selengkapnya



LAPORAN SURVEI KEPuasan MASYARAKAT TRIWULAN III 2022



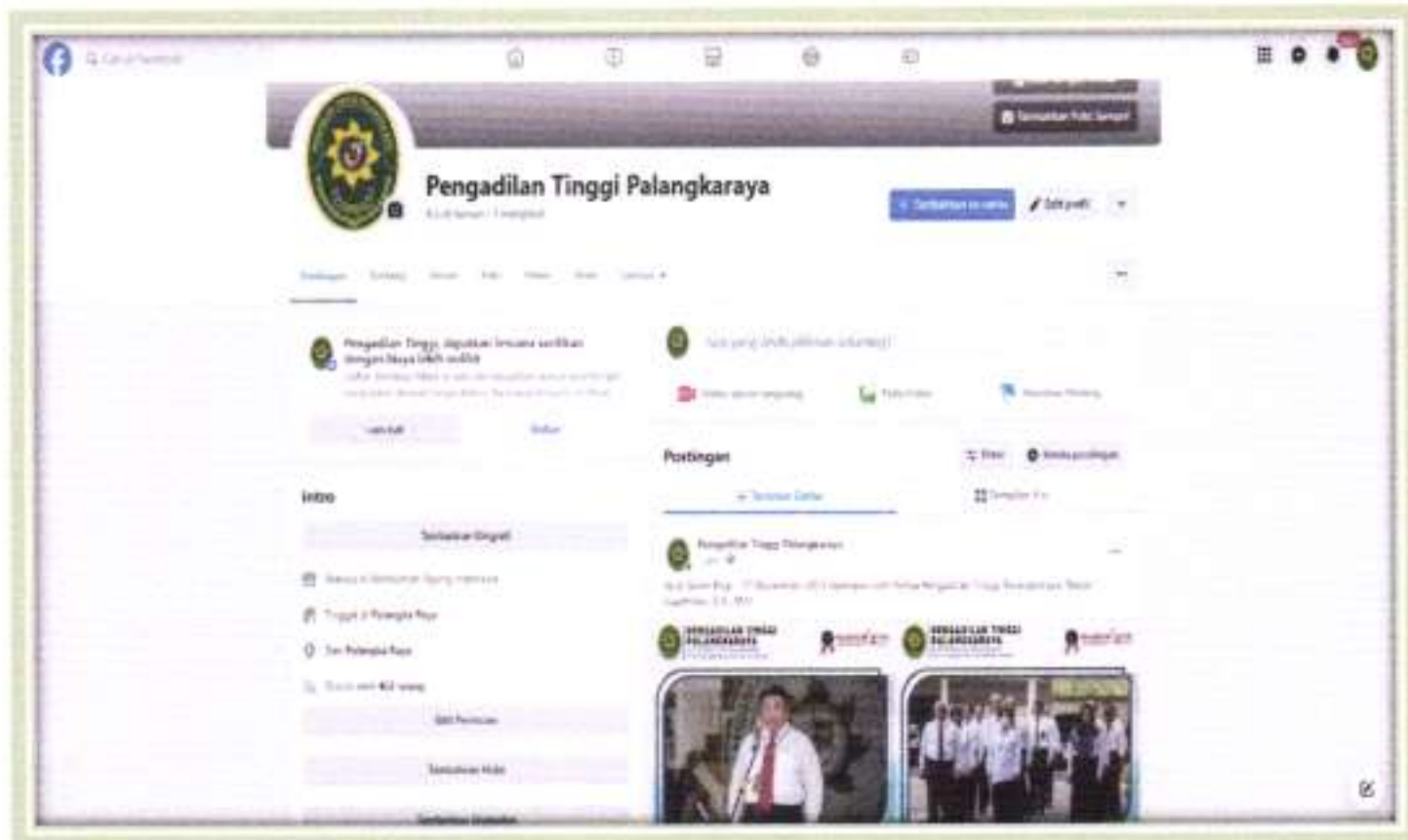
4



Gambar 1. Tampilan website resmi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

- ❖ **Email dan telepon (faxmilie) Pengadilan Tinggi Palangkaraya**  
 Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga memiliki sarana informasi yang dapat diakses oleh para pencari informasi menggunakan surat elektronik yang dapat diakses melalui [ptpalangka@gmail.com](mailto:ptpalangka@gmail.com) selain itu Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga menyediakan 2 (dua) nomor telepon sekaligus faxmile yang dapat digunakan juga untuk mendapatkan informasi yakni (0536) 3221853 – 3221854 Fax 3221854, selain itu juga terdapat aplikasi Sistem Pelayanan Digital Elektronik (SAGITA) untuk mempermudah masyarakat yang ingin menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan nomor 082152552872.
- ❖ **Media Sosial**  
 Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga memanfaatkan media sosial untuk menyediakan informasi kepada masyarakat yang terdiri dari Facebook, Instagram, dan Youtube yang juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi satu atau dua arah;

## Facebook



Gambar 2. Tampilan Akun Facebook resmi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

## Instagram

Akun resmi *Instagram* Pengadilan Tinggi Palangkaraya



Gambar 3. Tampilan Akun Instagram resmi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

## Youtube



Gambar 4. Tampilan Akun Youtube resmi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

- ❖ Meja Informasi (Information Desk) Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyediakan sarana keterbukaan informasi untuk masyarakat yang membutuhkan informasi secara langsung dengan petugas dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya berupa Meja Informasi (Information Desk) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang letaknya berada di lobby gedung Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah ditunjuk petugas yang berkompeten untuk memberikan penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Adapun Meja Informasi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya memiliki jam operasional pelayanan untuk setiap harinya yakni pada hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 WIB s.d. pukul 15.00 WIB (istirahat dari pukul 12 s.d. 13.00 WIB) dan hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB s.d. pukul 15.00 WIB (istirahat dari pukul 11.30 WIB s.d. 13.00 WIB);

Pada Meja Informasi telah tersedia seperangkat PC (personal computer) yang dapat mengakses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk dapat mengetahui jadwal persidangan selain itu juga pada ruang tunggu PTSP serta ruang tunggu sidang terdapat masing-masing 1 layar televisi berukuran 50" yang memuat jadwal persidangan serta profile Pengadilan Tinggi Palangkaraya;



Gambar 6. Tampilan SIPP Pengadilan Tinggi Palangkaraya





Gambar 7. Tampilan PTSP Pengadilan Tinggi Palangkaraya

## 2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan yang dijabat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang dijabat oleh Para Kasubag dan Para Panitera Muda;
5. Petugas Layanan Informasi yang dijabat oleh pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk membantu menyiapkan data dan menjalankan pelayanan di PTSP Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

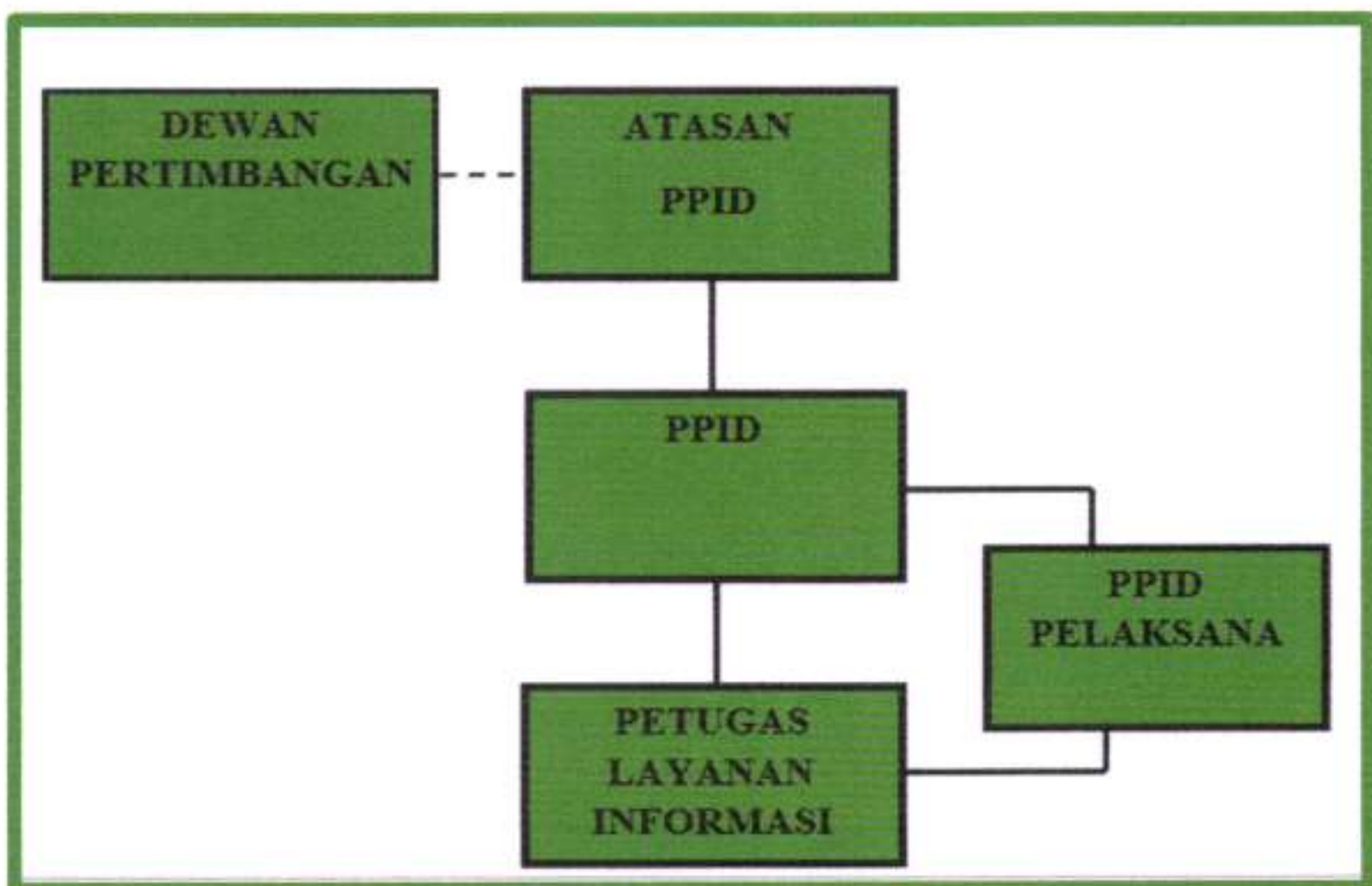
Adapun struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sebagai berikut :

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI  
PALANGKARAYA

NOMOR: 72/KPT/HK/SK/1/2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

TANGGAL: 11 JANUARI 2023

**Struktur Pelaksana Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada  
Pengadilan Tinggi Palangkaraya**



Dalam pelaksanaan tugas struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah dilaksanakan dengan baik dan cepat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dimana Petugas Layanan Informasi akan membantu masyarakat untuk mengakses website ataupun media sosial resmi milik Pengadilan Tinggi Palangkaraya guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

Sedangkan untuk pelayanan biasa dimana masyarakat datang secara langsung maka Petugas Layanan Informasi akan memberikan *form* permohonan informasi untuk diisi oleh Pemohon yang pada umumnya informasi untuk memperoleh layanan informasi yang dibutuhkan.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa berupa salinan putusan akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah dan berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan yang ada di bawahnya;

Terhadap Pemohon Informasi yang tidak puas atau keberatan dengan pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menyediakan loket atau Meja Pengaduan dengan menunjuk petugas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

### 3. Anggaran

Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mendapatkan anggaran beberapa sarana untuk mendukung masyarakat untuk mendapatkan pada tahun anggaran 2022, diantaranya sebagai berikut :

No	Jenis Sarana	Jumlah Unit	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
1.	Printer	2 Unit	10.000.000	DIPA 01 099141	
2.	AC Standing	1 Unit	25.000.000	DIPA 01 099141	
3.	PC	5 Unit	12.187.400	DIPA 01 099141	

### C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Adapun data pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya periode Januari sampai dengan Desember 2022, sebagai berikut:

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Pengadilan Tinggi Palangkaraya yaitu Nihil. Pemohon Permohonan Informasi Publik mengenai Perkara dan putusan dapat datang langsung ke kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan mengisi form permintaan informasi. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan sarana elektronik untuk mendapatkan informasi di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

**D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>								

Dari data diatas maka dapat disimpulkan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya di tahun 2022 tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

## E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

### 1) Kendala Eksternal

**Kondisi masyarakat** khususnya yang berada di wilayah Kalimantan Tengah yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang Peradilan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya, namun untuk memberikan pemahaman atau layanan informasi seluas-luasnya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya sudah menyediakan meja dan petugas informasi yang akan melayani masyarakat yang datang secara langsung untuk meminta layanan informasi.

**Kondisi Teknologi Pendukung**, meskipun Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menyediakan banyak sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan bahkan telah dilakukan sosialisasi akses informasi melalui media sosial namun kondisi teknologi beberapa daerah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya seperti ketersediaan jaringan internet masih tidak ada sehingga masyarakat tidak bisa mengakses layanan informasi Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanpa harus datang ke kantor Pengadilan.

### 2) Kendala Internal

#### 2.1 Kendala Teknis

Kurangnya ketersediaan sarana pendukung layanan informasi publik yang dapat diakses secara mandiri oleh Pemohon Informasi di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, atau adanya suatu aplikasi yang berisikan informasi yang memudahkan dijangkau oleh petugas informasi maupun pemohon informasi sehingga prinsip cepat, tepat dan sederhana dapat ditingkatkan lagi dalam pelayanan informasi.

#### 2.2 Kendala Substansi

Yang dimaksud kendala substansi ini berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam memberikan layanan permohonan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung ke kantor.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya diharapkan dapat mampu mengembangkan suatu sistem informasi dan dokumentasi yang mampu dengan mudah melayani permohonan informasi secara elektronik, dimana dalam fiturnya dapat memberikan notifikasi langsung kepada admin untuk menjawab permohonan informasi dan mengeluarkan laporan mengenai jenis permohonan informasi publik yang sering dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan mudah.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan informasi di masa-masa yang akan datang.

**Palangka raya, 24 Januari 2023**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

**Panitera Muda Hukum,**



**HARLY SIMANJUNTAK,S.H.**